

# **Analisis Efektivitas Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS): Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal**

Avita Putri Wiryawan<sup>1</sup>  
Departemen Politik dan Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro, Semarang-Indonesia

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Salah satu permasalahan tersebut ialah belum optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar yang termasuk ke dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Anak yang semestinya dirawat dengan baik dan dipenuhi hak serta kebutuhan dasarnya ditelantarkan, di mana penelantaran tersebut menimbulkan dampak negatif yang merugikan bagi diri mereka. Sehubungan dengan itu, Dinas Sosial Kabupaten Tegal berupaya mengatasi permasalahan anak terlantar dengan pelayanan rehabilitasi sosial. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali informasi dan data mengenai pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal yang hasilnya akan dianalisis lebih lanjut dalam kaitannya dengan efektivitas pelayanan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi, serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal sudah cukup optimal, tetapi masih terdapat kekurangan dalam aspek ketepatan manfaat program, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan. Rekomendasi yang dapat diberikan di antaranya mencakup penyediaan sarana untuk layanan kedaruratan, prasarana berupa buku untuk belajar anak, penambahan jumlah sumber daya manusia yang bertugas berjaga di rumah singgah, serta penyelenggaraan kegiatan bimbingan yang lebih bervariasi dengan memperhatikan pengembangan potensi anak.

**Kata Kunci:** anak terlantar, rehabilitasi sosial, efektivitas.

---

<sup>1</sup> Korespondensi Penyusun: [avitaputriwiryawan@students.undip.ac.id](mailto:avitaputriwiryawan@students.undip.ac.id)

## **ABSTRACT**

*This research is backed up by the identification of problems with the services of the Tegal Regency Social Service. One of these problems is the lack of optimal social rehabilitation services for neglected children who are included in the category of Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Children who should be well cared for and have their rights and basic needs fulfilled are neglected, where this neglect has a detrimental negative impact on them. In connection with that, the Tegal Regency Social Service is trying to overcome the problem of neglected children with social rehabilitation services. The aim of this research is to explore information and data regarding social rehabilitation services for neglected children by the Tegal Regency Social Service, which will be analyzed further in relation to the effectiveness of the service. The approach used in this research is a qualitative approach. The data collection techniques used were interviews, documentation, and literature study. The results of the research show that the social rehabilitation services for neglected children by the Tegal Regency Social Service are quite optimal, but there are still deficiencies in the aspects of accuracy of program benefits, facilities and infrastructure, and human resources that need to be improved. Recommendations that can be given include providing facilities for emergency services, infrastructure in the form of books for children to learn, increasing the number of human resources on duty at the halfway house, and organizing more varied guidance activities by paying attention to the development of children's potential.*

**Keywords:** *neglected children, social rehabilitation, effectiveness.*

### **A. Pendahuluan**

Setiap individu memiliki haknya masing-masing untuk memperoleh kesejahteraan sosial serta kehidupan yang layak. Pernyataan ini tentunya sejalan dengan tujuan negara kita, yaitu mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat. Akan tetapi, fenomena yang ada di lapangan justru merefleksikan bahwa tujuan tersebut belum dapat diakomodasi oleh pemerintah kita karena sejumlah faktor yang tak ayal menghambat terwujudnya kesejahteraan sosial. Keberadaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau yang disebut dengan PMKS seakan menunjukkan bahwa pemerintah

tidak dapat menangani permasalahan kesejahteraan sosial, menjalankan tugasnya untuk menjamin hak individu memperoleh kehidupan yang layak.

Tidak hanya di kota besar saja, problematika ini juga banyak kita jumpai di seluruh penjuru negeri mengingat penyelenggaraan pemerintahan di daerah sendiri seringkali tidak terlaksana dengan baik. Kabupaten Tegal yang merupakan salah satu daerah yang termasuk ke dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah pun tidak terlepas dari permasalahan kesejahteraan sosial. Salah satu permasalahan yang ditetapkan

dalam pemetaan permasalahan pelayananan Dinas Sosial Kabupaten Tegal dan perlu diteliti secara lebih lanjut yakni adanya kecenderungan meningkatnya jumlah anak yang menyandang permasalahan kesejahteraan sosial seperti anak terlantar, disebabkan belum optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial anak. Meningkatnya jumlah anak terlantar tersebut tentu dirasa kian mencemaskan sebab dapat menimbulkan dampak negatif lain seperti yang dijelaskan dalam penelitian Natika dan Rinjani yang dilatarbelakangi oleh persoalan tersebut. Adapun dampak tersebut di antaranya seperti permasalahan ketertiban, kebersihan dan keamanan, serta keindahan kota (Natika & Rinjani, 2022). Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terinventarisir di Kabupaten Tegal menunjukkan bahwa terdapat 5 (Lima) kelompok sasaran prioritas, yakni: (1) Kemiskinan, (2) Kecacatan, (3) Keterlantaran, (4) Korban Bencana, dan (5) Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku. Di antara kelompok sasaran tersebut, anak terlantar termasuk dalam kategorinya. Permasalahan ini pun menjadi tantangan bagi Dinas Sosial Kabupaten Tegal untuk mengoptimalkan pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar karena program rehabilitasi sosial yang dilaksanakan tidak dapat terimplementasikan secara efektif dan efisien jika tidak ada upaya untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan, terlebih anak

harus dipenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. Penanggulangan PMKS telah ditetapkan sebagai isu strategis dan prioritas pembangunan Kabupaten Tegal. Lebih lanjut, terdapat permasalahan terkait adanya identifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal bahwa masih terdapat banyak data lain yang belum terungkap mengenai anak penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berbuntut pada tidak diperbarunya data dan berdampak pada minimnya kinerja pelayanan rehabilitasi sosial anak.

Anak pada hakikatnya ialah karunia dan amanah dari Tuhan yang senantiasa harus kita jaga karena hak-hak sebagai manusia, harkat, dan martabat melekat dalam diri mereka, dan ketiga hal ini harus dijunjung tinggi. Sebagai amanah yang diberi Tuhan kepada orang tua, orang tua sudah sepantasnya berusaha memenuhi hak anak yang berupa kebutuhan dasar mereka seperti pangan, sandang, dan juga papan. Suyanto (2019) dalam Fitri, Alsunah, & Febriani (2020) menyatakan bahwa anak terlantar sesungguhnya dikelompokkan ke dalam kategori rawan atau anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus. Seorang anak dapat dikategorikan sebagai anak terlantar bukan hanya karena tidak memiliki salah satu atau kedua orang tua lagi, melainkan karena hak untuk mendapat pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hak dasar lainnya tidak terpenuhi disebabkan kelalaian,

kesenjangan, ketidakmampuan, atau tidak adanya pengertian dari orang tua. Selain itu, seorang anak juga dikatakan terlantar ketika hak tumbuh serta berkembangnya tidak dapat dipenuhi sebagaimana mestinya, tidak mendapat perhatian dari orang tua maupun kerabatnya, atau bahkan tidak diinginkan kehadirannya (Permatasari, 2022).

Adapun penanganan yang mungkin untuk dilakukan salah satunya yaitu dengan pelayanan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi didefinisikan sebagai usaha memperbaiki penderita cacat, baik itu secara fisik maupun psikis, yang dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi rohani, jasmani, sosial, pekerjaan, serta ekonomi, sehingga seorang individu dapat kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat yang bermanfaat bagi dirinya sendiri atau bagi lingkungan masyarakat (Cholid & Yulinda, 2021). Beragam penyebab menjadikan anak terlantar terpaksa harus menjalani kehidupan yang sulit, di mana hak dasar mereka sebagai anak pun terabaikan. Polemik ini apabila terus dibiarkan tentu akan berimplikasi pada munculnya persoalan baru. Anak terlantar rentan menjadi korban tindak kejahatan, baik itu kekerasan, diskriminasi, maupun marginalisasi. Di antara dampak negatif yang mungkin dirasakan oleh anak-anak terlantar yang menjadi korban suatu tindak kejahatan yaitu mereka cenderung menjadi pribadi yang tertutup, mereka kehilangan kepercayaan dirinya untuk berinteraksi dengan

orang lain; mengalami gangguan kecemasan; menderita depresi; dan sebagainya. Pemerintah sudah seharusnya merangkul anak-anak terlantar, berupaya untuk menangani persoalan anak terlantar dengan memberikan perlindungan serta pengasuhan. Anak terlantar seperti yang kita ketahui dipelihara oleh negara. Artinya, negara berkewajiban memelihara mereka dan melindungi hak-hak mereka secara penuh. Berkaca pada permasalahan tersebut, maka pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar perlu untuk digencarkan mengingat pemerintah juga berkewajiban melindungi mereka. Dengan pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar, maka diharapkan hak yang seharusnya mereka dapatkan dapat terpenuhi.

## **B. Metode**

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian dari penelitian ini yaitu Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Adapun subjek dari penelitiannya sendiri yakni Dinas Sosial Kabupaten Tegal sebagai instansi yang menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi sosial serta anak terlantar di Kabupaten Tegal, Pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, sedangkan untuk teknik analisis datanya terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi.

### C. Kajian Pustaka

Menurut Gibson (1997) dalam Tangkilisan (2005) dapat diukur berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kejelasan tujuan yang akan diraih  
Sebagaimana yang kita tahu, menentukan tujuan merupakan langkah awal dari diadakannya sebuah pelayanan. Pelayanan pun harus memiliki tujuan yang jelas agar pelayanan yang hendak dilaksanakan menjadi lebih terarah. Dengan tujuan yang jelas, penyimpangan yang tidak sesuai dengan tujuan dapat dihindari dan tujuan pelayanan dapat dicapai sebagaimana mestinya.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan  
Strategi secara sederhana dipahami sebagai upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok guna mencapai target yang menjadi tujuannya. Kejelasan strategi dalam pelayanan berfungsi menjaga keberlangsungan dari suatu perencanaan, memudahkan pelaksanaan, serta pencapaian tujuan.
- c. Proses analisis dan perumusan  
Sebelum melaksanakan pelayanan, dibutuhkan analisis untuk mengetahui perumusan program pelayanan yang tepat diberikan kepada penerima pelayanan sesuai dengan hasil dari analisis kondisi

masing-masing penerima pelayanan tersebut.

- d. Perencanaan yang matang  
Rencana pelayanan yang matang bermakna bahwa arah pelaksanaan pelayanan sudah ditentukan dengan spesifik melalui penyusunan langkah-langkah yang sistematis. Dalam aspek ini, penting untuk mempertimbangkan kendala yang mungkin dihadapi.
- e. Ketepatan dalam menyusun suatu program  
Program yang telah disusun haruslah tepat sesuai dengan tujuan dari diadakannya pelayanan, baik itu dari segi ketepatan sasaran, maupun dari segi manfaat program.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja  
Indikator efektivitas yang juga penting dalam organisasi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang produktif dengan sarana serta prasarana yang diakomodasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien  
Sebaik apapun perencanaan suatu program, apabila tidak diimplementasikan dengan efektif dan efisien maka tujuan akan sulit untuk dicapai.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian  
Pengawasan dan pengendalian dalam pelayanan merupakan proses untuk memastikan bahwa kegiatan pelayanan dilaksanakan sebagaimana

seharusnya dengan membandingkan kinerja aktual dengan apa yang sudah menjadi ketetapan dalam perencanaan pelayanan. Seringkali pelaksanaan pelayanan gagal dikarenakan kurang ketatnya pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan, di mana dalam hal ini pengawasan dan pengendalian berfungsi menjaga kesesuaian keberlangsungan pelayanan dengan tujuannya.

#### **D. Hasil dan Pembahasan**

Dari penelitian yang terlaksana, diperoleh hasil sebagai berikut:

##### **a. Kejelasan tujuan**

Tujuan pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal adalah untuk menumbuhkan atau memulihkan kondisi atau fungsi sosial anak secara wajar dengan pemenuhan kebutuhan atau hak dasar anak. Ditetapkannya tujuan tersebut sesuai dengan kondisi atau permasalahan yang dihadapi oleh anak terlantar. Hal ini dikarenakan anak terlantar pada realitanya menghadapi permasalahan disfungsi sosial yang disebabkan oleh faktor tertentu. Disfungsi sosial tersebut terjadi dalam kehidupan sehari-hari mereka sebagai seorang anak sebagaimana yang dijumpai dalam penelitian. Tujuan yang relevan dengan permasalahan dan kebutuhan anak terlantar mengarahkan pelaksanaan

pelayanan kepada tujuan yang bermakna. Oleh sebab itu, pelayanan rehabilitasi sosial sudah seharusnya memiliki tujuan-tujuan pengentasan permasalahan disfungsi sosial yang dihadapi oleh anak terlantar agar nantinya mereka dapat menjalankan fungsi sosialnya dalam kehidupan, seperti tujuan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar. Tujuan pelayanan rehabilitasi sosial yang demikian memberikan manfaat bagi anak terlantar dengan adanya upaya pemenuhan hak atau kebutuhan mereka serta mengatasi permasalahan yang dihadapi. Alasannya ialah karena tujuan sudah memberikan arahan yang jelas dalam pelayanan guna memastikan pelayanan didukung secara efektif dan efisien. Lebih lanjut, tujuan utama pelayanan rehabilitasi sosial, yakni menumbuhkan atau memulihkan kembali fungsi sosial anak secara wajar juga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan yang lebih rinci dengan strategi pencapaian tujuan yang perumusannya tidak terlepas dari tujuan utama tersebut. Penetapan tujuan pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal pun memungkinkan pengukuran efektivitas karena pencapaian

keberhasilan dalam pelayanan akan dibandingkan dengan tujuan tersebut, sehingga diketahui peningkatan yang memberikan manfaat dan menjawab permasalahan. Tujuan rehabilitasi sosial anak terlantar menciptakan urgensi dalam pelayanan, yaitu bahwa kegiatan yang diselenggarakan akan diarahkan untuk refungsionalisasi dengan menumbuhkan motivasi serta pola pikir pelaksana yang berorientasi pada tujuan rehabilitasi sosial. Dengan begitu, Dinas Sosial Kabupaten Tegal telah memiliki peta jalan yang terdefinisi dengan jelas dalam melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar.

b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan

Adapun strategi Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar yaitu mencakup strategi dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan, meningkatkan kompetensi para pelaksana, menjalin jejaring kerja dengan pihak lain, dan melibatkan peran masyarakat dalam pelayanan.

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan  
Dinas Sosial Kabupaten Tegal memiliki akun media sosial yang dimanfaatkan sebagai

platform untuk menyebarluaskan informasi mengenai pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar. Melalui unggahan yang dipublikasikan tersebut, masyarakat Kabupaten Tegal dapat mengetahui bahwa Dinas Sosial Kabupaten Tegal menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar yang ada di daerah Kabupaten Tegal. Selain itu, unggahan di media sosial juga menjadi bukti bahwa telah diselenggarakan pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar, sehingga transparansi kegiatan berikut dengan progressnya juga diketahui oleh masyarakat Kabupaten Tegal. Masyarakat pun dapat mengajukan pertanyaan atau aduan melalui akun media sosial Dinas Sosial Kabupaten Tegal, yaitu melalui X, Facebook, atau nomor WhatsApp yang tercantum pada bio akun Dinas Sosial Kabupaten Tegal pada platform X dan Facebook.

2. Meningkatkan kompetensi para pelaksana  
Strategi ini diwujudkan dalam partisipasi pada kegiatan-kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak-pihak tertentu.

Pelatihan yang diikuti umumnya seperti pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, atau dari kementerian, yaitu pelatihan SDM, pengembangan kemampuan teknis, dan lain-lain. Di samping sebagai peserta, bidang rehabilitasi sosial juga menyelenggarakan kegiatan bimbingan bagi pilar-pilar sosial, misalnya dalam forum bimbingan teknis. Diadakannya bimbingan ini dimaksudkan untuk mengarahkan pilar-pilar sosial pada peningkatan kapasitasnya melalui kemampuan dan potensi yang ada pada dirinya.

3. Menjalin jejaring kerja  
Dalam menjalin jejaring kerja dengan pihak lain, Dinas Sosial Kabupaten Tegal menggandeng stakeholder dari dunia usaha swasta, sektor publik atau pemerintah, dan juga masyarakat sipil. Dinas Sosial Kabupaten Tegal bekerja sama dengan puskesmas dan rumah sakit setempat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan atau fisik anak terlantar. Sebelum anak terlantar mendapatkan pelayanan, mereka harus menempuh pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Bagi anak

terlantar yang kondisi kesehatannya baik, mereka akan langsung dirujuk ke rumah singgah milik Dinas Sosial Kabupaten Tegal untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial, sedangkan bagi anak terlantar yang kondisi kesehatannya tidak baik, mereka akan mendapatkan perawatan di puskesmas atau rumah sakit sebelum mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial. Kerjasama dalam pemeriksaan fisik anak terlantar juga dilaksanakan bersama BNN Tegal untuk proses screening awal. Pada bidang pendidikan, Dinas Sosial Kabupaten Tegal menjalin hubungan kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kabupaten Tegal serta perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Tegal. Kerjasama ini berupa kegiatan-kegiatan sosialisasi program pendidikan yang dapat diikuti oleh anak terlantar dan pembinaan. Terdapat pula jejaring kerja yang dijalin dengan dunia usaha, yaitu melalui pemberian alat bantu bagi anak terlantar penyandang disabilitas yang didanai dengan program Corporate Social Responsibility (CSR).

4. Melibatkan masyarakat dalam pelayanan  
Bentuk pelibatan yang diwujudkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal adalah dengan usaha menghidupkan komunitas yang ada di masyarakat dan menggelar forum. Kegiatan ini dilangsungkan dengan tujuan menjangkau aspirasi, pemberdayaan, dan menjalin silaturahmi agar tercipta hubungan baik di antara kedua belah pihak.
- c. Proses analisis dan perumusan  
Proses analisis dan perumusan dalam pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal dimulai dari proses asesmen. Proses asesmen atau pengungkapan masalah dilakukan setelah ada penjangkauan atau penjangkauan anak terlantar di titik tertentu yang ada di Kabupaten Tegal. Mereka akan dibawa ke rumah singgah milik Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Kemudian, di sana akan dilakukan pendataan anak terlantar terlebih dahulu sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pendataan ini meliputi pendataan data diri, kondisi atau permasalahan yang dihadapi oleh anak terlantar, dan intervensi. Proses asesmen melibatkan anak terlantar secara langsung, sehingga anak terlantar bisa mengungkapkan permasalahannya pada petugas asesmen untuk dianalisis dan ditindaklanjuti dengan intervensi. Pada form yang digunakan, data-data yang harus dilengkapi dalam form sudah lengkap. Perinciannya pun terbilang cukup detail, sehingga dapat diketahui latar belakang dari anak terlantar secara utuh. Akan tetapi, hal ini juga sangat bergantung pada petugas yang melakukan asesmen.
- d. Perencanaan yang matang  
Pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal dimulai dengan membuat perencanaan yang matang untuk setiap kegiatan. Perencanaan yang matang menjadikan pelayanan lebih terpadu karena sebelumnya sudah dilakukan identifikasi terhadap aspek atau indikator yang ada di dalam kegiatan pelayanan. Adapun aspek tersebut ialah terkait data pendukung, sudut pandang pemecahan masalah, wujud konkret atau gambaran kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan, serta anggaran. Membahas perencanaan yang matang berarti juga membahas mengenai perencanaan dalam menghadapi kendala yang mungkin muncul dan keadaan darurat. Adapun perencanaan dalam menghadapi keadaan darurat terwujud dengan layanan kedaruratan, yaitu penanganan secara segera bagi anak terlantar yang memerlukan pertolongan karena kehidupannya sedang terancam dan/atau tidak

terpenuhi kebutuhannya. Layanan kedaruratan selanjutnya terbagi menjadi dua, yaitu penjangkauan dan rujukan. Penjangkauan dilaksanakan melalui kerjasama dengan Satpol PP atau oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal sendiri dengan menggunakan mobil PMKS sebagai sarannya, sedangkan layanan rujukan dipenuhi dengan merujuk anak terlantar ke balai rehabilitasi sosial atau panti sosial.

- e. Ketepatan dalam menyusun program  
Pelayanan rehabilitasi sosial diarahkan agar tepat manfaat dan tepat sasaran. Namun demikian, aspek kebermanfaatan program belum begitu dirasakan oleh anak terlantar karena waktu pelayanan rehabilitasi yang singkat, yaitu 7 hari dan kegiatan bimbingan yang diadakan terbilang kurang bervariasi. Dalam waktu yang singkat, anak terlantar mengharapkan agar mereka diberikan bimbingan untuk belajar tentang pengetahuan dasar atau umum agar mereka memiliki bekal untuk belajar hal-hal baru lainnya. meskipun begitu, pendidikan spiritual dan budi pekerti sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Hasilnya, terdapat perubahan sikap dan perilaku yang lebih baik dari anak terlantar. Agar kegiatan atau program yang ada dalam pelayanan rehabilitasi sosial dapat tepat sasaran, Dinas

Sosial Kabupaten Tegal melakukan asesmen mendetail untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan anak terlantar. Kegiatan pelayanan tidak diberikan begitu saja tanpa memperhatikan kondisi dan kebutuhan anak, sehingga setiap kegiatan sudah direncanakan sarannya masing-masing.

- f. Sarana dan prasarana  
Dinas Sosial Kabupaten Tegal mempunyai 2 unit mobil PMKS berjenis mini bus. Sebagai sarana, mobil PMKS digunakan dalam penjangkauan anak terlantar di lokasi tertentu, misalnya di sekitar lampu merah, taman, dan kawasan toko atau pasar. Selain itu, mobil PMKS juga berfungsi dalam layanan kedaruratan apabila terdapat laporan atau aduan terkait anak terlantar yang membutuhkan pertolongan segera, baik itu di lokasi anak terlantar tinggal, bekerja, atau di rumah singgah milik Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Sebagai prasarana, pengelolaan rumah singgah dilaksanakan secara langsung oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Prasarana yang sudah tersedia di rumah singgah di antaranya mencakup gedung, ruang pemerlu layanan, ruang sekretariat, dapur, 4 kamar tidur untuk laki-laki dan perempuan, 2 ruang isolasi, kamar mandi, serta lahan untuk olahraga. Sementara itu, prasarana penunjang yang belum tersedia dan dibutuhkan

oleh anak terlantar adalah buku-buku bacaan untuk mendukung kegiatan belajar mereka selama mendapat pelayanan.

g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien

Pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar terdiri atas beberapa tahapan yang di dalamnya memuat berbagai program atau kegiatan. Tahap tersebut yaitu mencakup penjangkauan untuk menjangir anak terlantar; asesmen atau pengungkapan masalah; resosialisasi atau pembelajaran terkait nilai-nilai, norma, sikap, dan perilaku; pemberdayaan untuk anak; pemberdayaan untuk orang tua atau keluarga anak; dan terminasi atau penghentian pelayanan.

Pelayanan rehabilitasi sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal dinilai sudah cukup membantu anak terlantar memperoleh hak dan kebutuhan dasarnya. Anak-anak mendapatkan perlakuan layak, memperoleh pelajaran baru tentang berbagai hal dalam kehidupan, dapat melanjutkan sekolah, dan sebagainya. Pencapaian tujuan untuk mengembalikan fungsi sosial anak terlantar secara wajar dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan dasar anak. Dari hasil penelitian, tujuan yang berhasil tercapai melalui pemenuhan kebutuhan dasar yaitu kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Pada saat mendapatkan pelayanan, perubahan positif yang

nampak dari diri anak terlantar adalah mereka berperilaku dengan baik sesuai dengan nilai-nilai yang sudah diajarkan pada mereka. Mereka bersikap sopan dan santun dengan orang lain, mampu mengimplementasikan ajaran agama dalam kesehariannya, mengontrol emosinya, serta semakin mandiri. Perubahan ini tentu didukung pendekatan yang baik dari pelaksana kepada anak-anak terlantar. Hubungan yang terjalin di rumah singgah bersifat informal, yaitu perkawanan atau kekeluargaan. Efisiensi juga terlihat pada hubungan kerjasama yang dijalin dengan pihak lain. Hubungan kerjasama tersebut selanjutnya mengarahkan pelayanan pada efisiensi dan sinergi, peningkatan cakupan pelayanan, penyelesaian masalah yang kompleks, dan peningkatan akuntabilitas serta transparansi.

h. Sistem pengawasan dan pengendalian

Sistem pengawasan dan pengendalian internal tersebut dilakukan oleh pimpinan hingga pelaksana. Mekanismenya diintegrasikan dengan serangkaian kegiatan yang ada dalam pelayanan dan dilaksanakan dalam lima unsur yang terdiri atas lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi. Di samping itu, dilaksanakan

pula evaluasi terpisah, yaitu evaluasi yang pada umumnya dilakukan oleh pihak eksternal seperti Inspektorat Kabupaten Tegal, BPKP, ombudsman, dan lain-lain. Evaluasi yang dilakukan oleh inspektorat dan BPKP lebih dititikberatkan pada kegiatan audit. BPKP sendiri di sini lebih berperan dalam kegiatan yang sifatnya consulting, tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana yang dilakukan oleh inspektorat. Pada kasus-kasus penyelewengan, pengusutan serta pelaksanaan audit dilaksanakan terlebih dahulu oleh APIP sebelum diserahkan kepada APH apabila ditemukan indikasi KKN.

#### **E. Simpulan**

Rehabilitasi sosial anak terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal sudah terlaksana dengan cukup efektif. Terdapat beberapa indikator efektivitas yang masih memerlukan upaya pembenahan. Dalam indikator ketepatan dalam menyusun program, yaitu tentang manfaat pelayanan rehabilitasi sosial, kebermanfaatan pelayanan belum begitu terasa pada aspek pengetahuan dan keterampilan anak. Pada indikator sarana dan prasarana, terdapat sarana penting yang belum tersedia seperti kendaraan operasional yang secara khusus ditempatkan di rumah singgah serta prasarana penunjang berupa buku bacaan untuk menunjang kegiatan belajar anak terlantar. Terkait dengan indikator pelaksanaan yang efektif dan efisien, khususnya

menyangkut sumber daya manusia, didapati bahwa tugas piket di rumah singgah yang dilaksanakan oleh satu pekerja atau penyuluh sosial saja belum cukup karena beban tugas berjaga yang berat, apalagi jika jumlah PMKS yang ditampung di rumah singgah sedang banyak. Pada indikator lainnya, Dinas Sosial Kabupaten Tegal sudah menjalankan tugasnya dengan baik selama menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar. Pencapaian tersebut terlihat pada aspek kejelasan tujuan yang diselaraskan dengan kondisi anak terlantar. Dengan strategi pencapaian tujuan diuraikan sebelumnya, pelayanan rehabilitasi sosial mampu mencapai tujuan yang lebih luas. Proses analisis dan perumusan pelayanan rehabilitasi sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal memperhatikan kebutuhan dan permasalahan yang disandang oleh anak terlantar, sehingga proses analisis dan perumusan ini menghasilkan intervensi yang diharapkan menjadi solusi yang efektif. Perencanaan pada pelayanan rehabilitasi sosial pun sudah cukup matang pada setiap kegiatannya, yaitu dengan melakukan identifikasi terhadap aspek-aspek yang ada dalam kegiatan tersebut. Tidak hanya itu, perencanaan ini juga mempertimbangkan keadaan darurat. Lebih lanjut, sistem pengawasan dan pengendalian berjalan dengan baik melalui sistem pengendalian dan

pengawasan internal serta eksternal.

## F. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu:

- a. Penyediaan sarana dan prasarana yang belum ada di rumah singgah, seperti kendaraan operasional serta buku bacaan untuk menunjang kegiatan belajar anak.
- b. Mempertimbangkan penambahan jumlah sumber daya manusia yang bertugas berjaga di rumah singgah. Adanya penambahan jumlah sumber daya manusia akan memudahkan pengawasan pelaksanaan pelayanan, baik itu pengawasan terhadap pelaksana maupun terhadap anak terlantar.
- c. Aspek lain yang perlu ditingkatkan ialah kegiatan bimbingan di rumah singgah. Rumah singgah hendaknya menyelenggarakan kegiatan bimbingan atau pelatihan tambahan yang bermanfaat bagi pengembangan potensi anak dengan berinovasi. Kegiatan bimbingan atau pelatihan yang pernah dilaksanakan masih terhitung sedikit. Adapun kegiatan bimbingan atau pelatihan yang dapat dilaksanakan yaitu bimbingan belajar ilmu pengetahuan umum seperti membaca, menulis, berhitung, atau lainnya; bimbingan atau pelatihan pembuatan kerajinan tangan, bimbingan kewirausahaan di bidang

kuliner, budidaya tanaman, atau budidaya hewan, dan lain-lain.

## G. Daftar Pustaka

- Agustina, N., & Setyawan, D. (2019). Implementasi Program Pembinaan Anak Terlantar (Studi pada Dinas Sosial Kota Malang). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(1), 76-80.
- Apliria, G. & Sahrul, M. (2024). Gangguan Fungsi Sosial Anak Akibat Kekerasan Orang Tua (Studi Kasus di Kampung Perigi Bedahan Kota Depok). *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(3), 201-213.
- Ariska, L., Alamsyah, & Junaidi. (2021). Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Terlantar di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Organ Ilir. *Jurnal Dinamika Manajemen dan Kebijakan Publik*, 1(1), 10-24.
- Cholid, N., & Yulinda. (2021). Layanan Bimbingan dan Konseling terhadap Anak Terlantar di Rehabilitasi Sosial UPTD PSBS Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Journal of Islamic Guidance and Counseling*, 1(2), 100-120.
- Erdina, T. V., & Hariani, D. (2017). Analisis Efektivitas Organisasi dalam Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Journal of Public Policy and*

- Management Review*, 6(3), 334-354.
- Falaq, Y., Rachman, M., & Suyahmo. (2016). Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Korban Trafficking pada Balai Rehabilitasi Sosial Sunu Ngesti Tomo Jepara. *Journal od Educational Social Studies*, 5(1), 53-60.
- Fitri, F. A., Alsunah, M. D., & Febriani, P. (2020). Implementasi Program Pembinaan Anak Terlantar pada Dinas Sosial Kota Sungai Penuh. *Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa*, 2(4), 12-31.
- Natika, L., & Rinjani, S. D. (2022). Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Terlantar (Studi Kasus di Dinas Sosial Kabupaten Subang). *The World of Public Administration Journal*, 4(1), 53-62.
- Permatasari, A. (2022). Program Pembinaan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Bandung. *TRANSPARANSI Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(2), 76-85.
- Ridlo, M. T., Hakim, M. L., & Rahayu, R. K. (2017). Analisis Kinerja Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Surabaya Tahun 2017. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 13-22.
- Rohana, S., Pamungkas, B., & Diyanti, S. (2020). Layanan Konseling Kelompok dalam Mengembangkan Rasa Percaya Diri Anak Terlantar (Studi Kasus di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan*, 21(2), 1-28.
- Sabilla, C. M., Nasir, M., & Dameria, E. (2022). Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dalam Melindungi Anak Terlantar Berkebutuhan Khusus Disabilitas Mental Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial (Studi di Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, 5(1), 21-31.
- Salidyn, M., Kadir, H. A., & Wahba. (2020). Analisis Sistem Pengelolaan Penanganan Anak Terlantar pada Dinas Sosial Kota Palu. *Jurnal Sinar Manajemen*, 7(2), 95-104.
- Santoso, B. I., Yulyana, E., & Aryani, L. (2022). Manajemen Strategi Dinas Sosial dalam Menangani Permasalahan Tuna Sosial Di Kota Bekasi (Studi pada Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan). *Jurnal MODERAT*, 8(2), 213-223.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Suyitno. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya*. Malang: Akademia Pustaka.
- Syawarudin, S. Y. (2021). Evaluasi Kinerja Dinas Sosial dalam Pembinaan Anak Jalanan di Kota Surabaya.

*Jurnal Penelitian  
Administrasi Publik, 1(1),  
105-110.*

Tangkilisan, H. N. S. (2005).  
Jakarta: PT Gramedia  
Widiasarana Indonesia.

Wekke, I. S. (2019). *Metode  
Penelitian Sosial.*  
Yogyakarta: Penerbit Gawe  
Buku.

Wicaksono, S. A., & Rusdiana,  
E. (2019). Pelaksanaan Hak  
Anak Terlantar pada Bidang  
Pendidikan di Kota Surabaya.  
*Novum: Jurnal Hukum, 6(3),  
68-76.*